
Ulasan Buku

Pancasila: Sebuah Monumen atau Leitstar Dinamis?

Wildan Sena Utama

Mahasiswa S2 Jurusan Sejarah Program Cosmopolis, Leiden

Judul : Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila
Penulis : Yudi Latif
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
Tebal : xxvii + 667 halaman
ISBN : 978-979-22-6946-8

Dalam refleksinya terhadap praktik bernegara dan berbangsa Indonesia, secara kritis Robert Elson mengungkapkan permasalahan yang relevan mengenai problem Indonesia dalam menjalankan hakikat politiknya sebagai sebuah negara-bangsa. Dalam bab kesimpulannya di *The Idea of Indonesia: A History*, Elson merangkum segala problematika tersebut, dengan mengatakan: “Penentuan hakikat negara dan bentuk bangsa adalah tugas kemerdekaan, dan pekerjaan itu panjang, berat dan sering diwarnai kekerasan, dan masih belum tuntas sampai sekarang. Walaupun ada kesepakatan mengenai kedaulatan rakyat, muncul pula ketidaksepakatan mengenai kedaulatan itu harus dijalankan dan dikelola. Walaupun ada usaha menuju masyarakat adil dan makmur serta kesepakatan bahwa negara harus berperan utama dalam usaha ini, tetap ada kebingungan mengenai caranya. Walaupun ada kesepakatan primordialitas harus memberi jalan kepada modernitas. Primordialitas masih tetap muncul dan mengganggu. Walaupun ada kesepakatan pentingnya bersatu dalam keberagaman, tidak ada kesepakatan bagaimana negara bisa menangani rasa keagamaan itu” (Elson, 2008: 317).

Refleksi kritis yang diberikan oleh Elson memberikan suatu fenomena bahwa sebenarnya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara masih gamang untuk mengkonsepsikan secara jelas dan filosofis apa itu Indonesia dan apa tujuan dari adanya Indonesia dan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Sehingga sebenarnya tidak aneh apabila sampai sekarang negara masih membiarkan ketika kaum radikal Islam melakukan kekerasan terhadap minoritas Islam. Tidak aneh ketika masih terjadi sekelompok umat Kristen yang masih kesulitan mendirikan gereja. Tidak aneh ketika tawuran antar kelompok etnis dan antar kelompok agama masih terjadi di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Tidak begitu aneh apabila praktik demokrasi kita begitu elitis, proseduralis dan materialis tidak mencerminkan “kedaulatan rakyat”. Dan pada akhirnya keberpihakan negara terhadap rakyat keseluruhan belum bisa ditemui bila melihat situasi riil Indonesia saat ini. Berbagai problem inilah yang memunculkan kegelisahan masyarakat tentang bagaimana Indonesia di masa depan.

Kegelisahan masyarakat Indonesia inilah yang memancing Yudi Latif untuk merespons problem-problem berbangsa dan bernegara saat ini. Formulasi apa yang kira-kira bisa sekaligus menjawab masalah-masalah yang masih mendera kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ini. Yudi Latif, salah seorang sedikit dari intelektual muda Indonesia yang menekuni masalah kenegaraan dan kebangsaan pada akhirnya sampai pada ide untuk mengaji berbagai masalah ini kembali kepada yang “dasar”, yang “esensial”, yang merupakan sebuah landasan dari nilai-nilai yang dibangun bersamaan dengan lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu Pancasila. Dalam buku ini ia beralasan bahwa Indonesia memerlukan terobosan yang “melampaui biasa” karena penyakit kemunduran moral dan karakter di Indonesia sudah pada tahap kanker bukan flu lagi. Dengan bahasanya sendiri Yudi mengatakan “bahwa kita memerlukan lebih dari sekedar *politics as usual*, kita memerlukan visi politik baru, visi ini harus mempertimbangkan bahwa krisis nasional berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa” (hal. 49). Melalui Pancasila, sebagai sebuah ide sekaligus praktik, Yudi ingin menemukan sekaligus mencari jawaban mengapa problem-problem Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa masih saja terus berulang. Melalui bukunya *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Yudi ingin melihat Pancasila bukan sebagai sebuah “monumen mati” tetapi “*leitstar* yang dinamis”, representatif mengurai permasalahan bangsa walaupun zaman terus bertransformasi.

Sebelum membahas substansi dari buku *Negara Paripurna* ini. Ada baiknya untuk membahas masalah pendekatan yang dipakai oleh Yudi Latif dalam karyanya ini. Dalam sebuah review kritis yang baik, sebuah karya sebaiknya tidak hanya dibahas hanya dalam (1) substansi saja tapi juga (2) masalah metode dan

metodologi atau pendekatan sang pengarang dalam menjelaskan karyanya.

Pancasila dan Pendekatan

Seorang sejarawan pemikiran terkemuka dari Inggris, Quentin Skinner, pernah berujar bahwa tugas dari sejarawan pemikiran adalah mempelajari dan menginterpretasikan *a canon of classic texts* (Skinner, 2002: 57). Pemikiran kerap kali tidak muncul dari sesuatu yang spontan diucapkan tetapi seringkali berdasarkan sebuah ide yang ditransformasikan dalam sebuah teks, baik itu politik, moral, ekonomi, agama ataupun budaya. Dalam mengaji sebuah pemikiran inilah teks amat penting untuk ditelusuri, didefinisikan, diinterpretasikan agar tidak tertutup kabut tebal karena satu dan lain sebab agar bisa dilihat kedalaman paling esensial yang selama ini ada di dalamnya. Sedangkan Michel Foucault, dalam *The Archeology of Knowledge* mengatakan bahwa sejarah ide adalah disiplin untuk membahas permulaan-permulaan dan kesudahan-kesudahan, rekonstitusi perkembangan yang linier, namun begitu pula dia bisa mendeskripsikan bentuk perubahan dan ketersalingkaitan antara satu domain dengan domain lainnya, memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilmiah berdifusi, dan menghadirkan kemunculan konsepsi filosofis (Foucault, 2002: 154). Kuntowijoyo dalam bukunya *Metodologi Sejarah* melihat bahwa sejarah pemikiran mempunyai tiga aspek tugas (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah (2) melihat konteks sejarahnya kapan dia muncul (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah (Kuntowijoyo, 2003: 191). Quentin Skinner menekankan bahwa pendekatan terhadap teks mesti berkonsentrasi pada apapun yang dikatakan tentang setiap “konsep-konsep yang fundamental” dan “pertanyaan-pertanyaan kekal” dalam moralitas, politik, agama dan kehidupan sosial (Skinner, 2002: 57).

Dalam karya *Negara Paripurna* ini, kita dibawa untuk melihat Pancasila sebagai “kanon teks” dalam sejarah Indonesia. Ada tiga pendekatan yang dipakai dalam karya ini, yaitu pendekatan historis, rasional dan kontekstual. Pendekatan historis untuk melihat *the origin* dan *the development* dari Pancasila. Tanpa melupakan konteks sejarah zamannya, darimana dia bermula, bertumbuh dan menjadi. Pendekatan rasional, untuk melihat bahwa Pancasila dibentuk dengan argumen-argumen yang rasional pada setiap silanya dan tidak berjarak dari situasi Indonesia masa itu serta tidak berjarak dari keinginan untuk mendirikan Indonesia nanti seperti apa – menjadi landasan rasional yang bisa mewadahi setiap elemen Indonesia. Kemudian, seperti yang disebutkan oleh Skinner diatas yaitu rasional disini juga dikaitkan dengan membahas setiap konsep-konsep yang fundamental. Dalam bahasan E. D. Hirsch bila kita ingin mengerti “*the meaning of the text*” kita harus mengerti “*what the text says*” (Hirsch, 1967). Pendekatan kontekstual, berusaha menghubungkan Pancasila dalam dimensi perubahan waktu. Ada semacam upaya untuk menguji relevansi dari pemikiran Pancasila dalam tantangan transformasi waktu. Namun, disinilah timbul sebuah perdebatan dalam sejarah pemikiran karena tidak semua teks bisa dihubungkan dalam konteks masa kini. Sehingga, menurut J. G. A Pocock pertama-tama kita mesti tetap melihat pemikiran tersebut dalam konteks masa itu atau katakanlah bisa memilah-milah dengan menggunakan metodologi. Aspek penarikan relevansi pemikiran masa lalu ke masa kini apabila dipaksakan dan dilebih-lebihkan bisa melahirkan anakronisme dan biasanya berdimensi politis.

Pancasila dan Pembedahan

Sejarah Pancasila tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Dia melalui berbagai fase yang mempengaruhi kelahiran pemikirannya.

Dan sebagai sebuah pemikiran, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pemikir yang menelurkan ide tersebut. Bila ingin melihat proses lahirnya pemikiran Pancasila kita tidak boleh melupakan rahimnya, yaitu pemikiran Soekarno (Latif, 2013: 17-43). Lahirnya pemikiran Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran Soekarno yang melalui lintasan episode waktu. Dari setiap episode waktu itu, ide yang muncul dari Soekarno tentang gagasannya dalam mengkonstruksi Indonesia harus dilihat dan diteliti secara seksama. Dalam *Negara Paripurna*, Yudi Latif melihat bahwa ada tiga fase kemunculan Pancasila sebagai sebuah ide sampai dia dipakai sebagai landasan bernegara (1) fase pembibitan (2) fase perumusan dan (3) fase pengesahan. Fase pembibitan, terjadi pada awal abad ke-20 dimana pergerakan Indonesia sudah mulai memikirkan tentang konstruksi kebangsaan. Yudi mengatakan bahwa Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda mempunyai peranan penting dalam menyebarkan gagasan persatuan nasional. Sartono Kartodirjo dalam esainya mengatakan bahwa Manifesto Politik PI tahun 1925 lebih dahulu dari Sumpah Pemuda 1928 dalam membayangkan gagasan mengenai nasion Indonesia bahkan demokrasi, unitarianisme, otonomi dan kemerdekaan. Elson dalam bukunya pula mengatakan bahwa “PI memberikan pengaruh kuatnya pada pemikiran politik di Hindia, yang menyebabkan organisasi rakyat di tanah air menggunakan haluan politik PI” (Elson, 2008: 45). Tapi mesti dilihat, bahwa PI dipengaruhi pula oleh trio Indische Partij yang diasingkan ke Belanda setelah Soewardi menulis pamflet “*Als ik eens Nederlander was*” tahun 1913. Dalam artikelnya, Akira Nagazumi yang menulis PI masa awal mengatakan bahwa sebelum orang-orang Indische Partij mempengaruhi PI dengan gagasan politiknya, PI medio 1908-1913 masih memformulasi cita-cita kelompok dan masih sedikit muatan politik didalamnya (Nagazumi, 1986: 134). Gagasan persatuan nasional awal bisa dilihat dari pemikiran

Tjiptomangoenkusumo yang menginginkan terciptanya “kesatuan dalam perbedaan”, sebuah masyarakat yang hidup bersama dalam keselarasan, menghormati satu sama lain sebagai orang yang sama-sama sederajat (Scherer, 1985: 151, 320). Douwes Dekker kemudian menambahkan “gagasan Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis dan ras atau keterikatan agama, melainkan rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya” (Elson, 2008: 15).

Pemikiran Soekarno sendiri tentang pergerakan Indonesia pada awalnya dibentuk ketika dia tinggal di rumah Tjokroaminoto pada usia belasan tahun. Disana dia bersinggungan dengan berbagai pemikiran para intelektual Indonesia dari bermacam latar belakang mulai dari islamis, nasionalis sampai marxis. Disinilah berbagai pemikiran itu berdialog, berkelindan dan mengendap dalam pikirannya dalam membaca fenomena-fenomena sosial politik masa itu. Dalam pengakuannya kepada Cindy Adams, Soekarno pun mengakui bahwa kediaman Tjokro ini membawa pengaruh yang besar kepada pemikirannya untuk meresapi “tidak satu pola pemikiran” (Adams, 2011: 90). Selanjutnya, ketika Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi, terdapat dua orang yang selanjutnya mempengaruhi pemikirannya mengenai nasionalisme dan persatuan, kedua orang itu ialah Douwes Dekker dan Tjiptomangoenkusumo. Khusus untuk Tjiptomangoenkusumo, menurut Bernhard Dahm, Tjipto adalah orang yang begitu mempengaruhi Soekarno setelah Tjokro dalam pemikirannya mengenai front persatuan. Ketika Soekarno melihat kondisi politik Indonesia pada medio 1920an yang begitu “dinamis tapi berserakan sendiri-sendiri”: PKI merupakan partai yang paling aktif, SI masih dibayang-bayangi kepopuleran pada masa kejayaannya yang pertama, partai-partai nasionalis dan organisasi kedaerahan yang banyak jumlahnya dan begitu rentan menuju

kepada gerakan etnosentrisme, kemudian organisasi berbasis agama yang juga punya pengaruh besar seperti Muhammadiyah dan NU, menurut Dahm “boleh dikatakan belum ada upaya mempersatukan mereka” (Dahm, 1987: 71-73). Soekarno lalu membuat suatu upaya pembentukan front persatuan diantara tiga roh pergerakan di Asia dan Indonesia: nasionalisme, islamisme dan marxisme, dibawah kerangka nasionalismenya sebagai ideologi utama anti-imperialisme. Soekarno berpendapat “bahwa tiga gerakan ini dalam suatu negeri jajahan tidak ada guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja sama menjadi satu gelombang besar yang maha kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya” (Soekarno, 1964: 2). Selanjutnya menurut Yudi Latif, pada tahun 1930an, Soekarno mulai merumuskan sintesis dari ketiga unsur tersebut dalam wujud pemikiran “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi” (Latif, 2011: 7).

Fase perumusan adalah fase persidangan pertama dari BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). Keanggotaan badan ini berjumlah 63 awalnya lalu berubah menjadi 69 orang. Keanggotaan dibagi menjadi lima golongan: golongan pergerakan, Islam, birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (*kooti*), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, walikota), peranakan Tionghoa, Arab dan Belanda. Dalam keanggotaan terdapat dua orang wanita – hal ini menandakan bahwa negara ini dibentuk bukan berdasarkan maskulinitas sehingga menurut Yudi Latif tidak tepat kiranya penggunaan istilah *founding fathers*. Tugas badan ini seperti kata Soepomo, “kami ingin membentuk suatu negara modern. Tapi dasar negara itu masih belum ditetapkan; belum ada kesepakatan se-Indonesia mengenai sebagian besar perkara dasar mengenai hakikat negara

baru” (Elson, 2008: 105-106).¹ Dalam rapat-rapat pembahasan tentang dasar negara ini beberapa anggota berpendapat tentang elemen-elemen fundamental dalam kehidupan bernegara.

Pada rapat tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin berbicara tentang lima prinsip fundamental untuk negara Indonesia kelak apabila ia berhasil didirikan, yaitu peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan) dan kesejahteraan sosial (Bahar, 1995: 8). Dalam *Negara Paripurna*, Yudi melihat bahwa masih ada kebingungan dari Yamin dalam menentukan mana dasar negara, bentuk negara, asas dan paham. “Permusyawaratan”, “perwakilan”, dan kebijaksanaan” (rasionalisme) disebut sebagai dasar. “Kebangsaan”, “kemanusiaan”, dan “kesejahteraan” sebagai asas. Sementara “perwakilan” digolongkan sebagai paham. Sedangkan “ketuhanan” tidak jelas kemana ia dimasukkan (Latif, 2011: 11). Namun, dalam pembacaan saya sendiri, ada sedikit perbedaan dengan apa yang dikemukakan Yudi Latif dalam membedah pemikiran Yamin. Memang benar bahwa Yamin mencampuradukan konsepsinya tentang dasar negara, bentuk negara dan paham negara, tapi kategorisasi yang dibuat Latif sedikit berbeda setelah saya membaca transkrip pidato Yamin. Yamin mula-mula mengatakan bahwa dasar negara Indonesia harus dibuat berdasarkan peradaban Indonesia yaitu “negara bangsa” (kebangsaan Indonesia). Lalu, ia sampai pada soal untuk menerangkan paham Indonesia merdeka, yaitu “peri-kemanusiaan”. Kemudian ia membicarakan dasar negara Indonesia merdeka yang lain berhubungan langsung dengan pembentukan negara yang tidak boleh meninggalkan unsur agama, yaitu “peri-ketuhanan”. Sementara itu “peri-kerakyatan” yang di dalamnya terdapat

unsur “permusyawaratan”, “perwakilan” dan “kebijaksanaan” sebenarnya dimasukkan oleh Yamin ke dalam hal dasar negara dan paham negara. Namun menurut Soeroso penjelasan panjang lebar Yamin tentang peri-kerakyatan yang melebar sampai kepada bagaimana bentuk dan cara bagaimana “peri-kerakyatan” Indonesia dijalankan itu lebih membahas kepada “bentuk negara” daripada “dasar negara” (Bahar, 1995: 22). Terakhir, “kesejahteraan rakyat” dalam penjelasan Yamin adalah “menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat dan keadilan sosial” (Bahar, 1995: 28).

Bagaimanapun juga, pidato yang diberikan oleh Moh. Yamin menurut Yudi Latif memberikan semacam masukan penting bagi Soekarno dalam merumuskan konsepsi yang disebutnya sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.² Soekarno dengan pidatonya pada tanggal 1 Juni tersebut pada awal uraiannya berusaha untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Radjiman Wediodiningrat terhadap dasar negara Indonesia dalam kerangka “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschauung*). Soekarno mengatakan:

“Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “*Philosophische grondslag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi” (Bahar, 1995: 63).

1 Namun, sebenarnya tugas badan ini bukan membicarakan masalah dasar negara tapi hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan.

2 Pidato Soepomo tentang konsepsi “negara integralistik” pada sidang selanjutnya tanggal 31 Mei 1945 memberikan pengaruh pula kepada Soekarno.

Di tengah pidatonya Soekarno menambahkan pentingnya *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* dalam sebuah negara, setelah melakukan refleksi terhadap berbagai negara yang mempunyai dasar falsafah negara, seperti Jerman, Uni Soviet dan Cina. Soekarno menyatakan:

“Tuan-tuan sekalian. “*Weltanschauung*” ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealisi di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam *weltanschauung* bekerja mati-matian untuk merealisasikan *weltanschauung* mereka itu. Maka tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikusno, bahwa banyak sekali negara-negara yang didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan. Tidak!” (Bahar, 1995: 69)

Setelah panjang lebar membicarakan konsepsi dan tujuan dari *philosophische grondslag*, Soekarno sampai pada konsepsinya tentang Pancasila sebagai dasar negara yang memuat lima prinsip. Dasar negara pertama menurutnya adalah “kebangsaan”. Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia harus didirikan dengan prinsip “semua untuk semua”, bukan untuk satu orang, satu golongan baik kelas ataupun etnis tapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian yang menurut Renan mempunyai kehendak perasaan akan bersatu dan mau bersatu. Prinsip yang kedua adalah “internasionalisme” atau “perikemanusiaan”, yang menurut Soekarno bahwa nasionalisme tidak dapat hidup kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme pun tidak dapat hidup subur kalau tidak bersandar pada nasionalisme. Indonesia mesti menuju pada persaudaraan dunia. Dasar ketiga adalah dasar “mufakat” atau demokrasi. Menurut Soekarno negara Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan tetapi

“semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Syarat mutlak daripada kuatnya Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Keempat ialah “kesejahteraan sosial”, menurut Soekarno ketika berdemokrasi hendaknya tidak begitu saja menjiplak demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni *politiek economische democratie* yang berarti tidak hanya “kesejajaran dalam politik” tetapi juga “kesejajaran dalam ekonomi” (Elson, 2008: 107). Terakhir, Soekarno menutup dengan prinsip “ketuhanan yang berkebudayaan”, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang saling hormat-menghormati satu sama lain, jikalau menyetujui bahwa negara Indonesia Merdeka berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.³

Sehabis Soekarno membicarakan konsepsinya tentang dasar negara tersebut, dia kemudian memberikan nama dari konsepsinya tersebut. Soekarno mengatakan “lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedang kita membicarakan dasar ... Namanya bukan Panca Dharma tetapi saya namakan dengan petunjuk teman yang ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”. Dan mengapa Soekarno memilih lima, ini dikarenakan Soekarno menurut Geertz adalah “manusia yang penuh dengan simbolisme” (Geertz, 2007: 321). Lima identik dengan “keramat” dalam alam kebudayaan Indonesia, Soekarno mengatakan bahwa rukun Islam lima jumlahnya, jari kita ada lima setangan, ada Panca Indra, dalam wayang ada Pandawa Lima, lalu dalam tradisi Jawa ada lima larangan sebagai kode etika (Latif, 2011: 17). Kelima sila dari Pancasila ini menurut George McT. Kahin merupakan sintesis

3 Pendapat Soekarno tentang lima sila Pancasila ini selain didasarkan oleh Yudi Latif, *Negara Paripurna* juga didasari oleh Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (eds), *Risalah Sidang...*, hal. 71-81.

dari pemikiran Islam modern, marxisme, demokrasi, dan gagasan demokrasi asli yang dijumpai di desa dan dalam komunalisme penduduk asli (Kahin, 2003). Bagi Soekarno inti dari Pancasila adalah semangat gotong royong. Jika Pancasila diperas silanya dari lima menjadi tiga lalu menjadi satu maka muncullah perkataan Indonesia yang tulen, yaitu “gotong royong”. Menurut Soekarno gotong royong adalah semangat dinamis menggambarkan suatu usaha, suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk kebahagiaan bersama.

Akhirnya, Pancasila konsepsi Soekarno ini melewati proses ujian selanjutnya ketika Panitia Sembilan menyusun rancangan pembukaan UUD Republik Indonesia. Secara komposisi Panitia Sembilan ini lebih adil daripada Panitia Delapan yang terlalu banyak representasi kebangsaan daripada Islam. Dalam Panitia Sembilan, 5 orang wakil kebangsaan dan 4 orang wakil golongan Islam yang diketuai Soekarno, berpendapat bahwa mesti ada kompromi terhadap dasar negara antara dua golongan ini. Konsensus antara dua golongan ini akhirnya berujung dengan pengawinan antara konsep ketuhanan dan kebangsaan pada rancangan pembukaan UUD yang disebut oleh Yamin sebagai Piagam Jakarta. Selain itu, Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dirubah urutan dan bunyi sila-silanya agar dianggap lebih memadai dalam konteks bernegara. Pindahan dilakukan pada sila kelima ketuhanan menjadi pertama namun ditambahkan dengan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya”. Sila internasionalisme atau perikemanusiaan berubah kalimatnya menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebangsaan Indonesia berubah urutan dari sila pertama menjadi ketiga dan berubah redaksinya menjadi persatuan Indonesia. Sila mufakat turun satu tangga menjadi sila keempat dan berubah bunyi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kesejahteraan turun juga

dari sila keempat menjadi kelima kemudian diubah kalimatnya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2011: 24-25). Bila dilihat perubahan ini mencerminkan suatu upaya untuk merangkai dasar negara dibentuk oleh fondasi moral yang menjadi landasan sifat kemanusiaan dalam berbangsa melalui etika demokrasi untuk mewujudkan tujuan politik Pancasila yaitu keadilan sosial.

Terhadap perubahan urutan dan redaksi Pancasila dalam Piagam Jakarta tidak ada yang mempermasalahkan secara serius kecuali dalam hal penambahan kata kewajiban menjalankan syariat Islam. Oleh berbagai tokoh nasionalis kebangsaan, hal ini malah tidak merepresentasikan situasi riil Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, budaya dan adat istiadat. Ini tercermin dalam sidang PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan sekaligus konstitusi. Namun akhirnya pada fase pengesahan, sidang PPKI 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta tetap diterima sebagai pembukaan UUD kecuali kata-kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya”. Kata-kata ini lalu diubah menjadi “Yang Maha Esa”. Moh. Hatta seorang individu agamis namun melihat “keseluruhan bangsa”, mempunyai andil dibalik hal ini. Dia melakukan lobi-lobi kepada tokoh politik Islam anggota PPKI diantaranya KI Bagus Hadikoesomo, Teuku Hasan dan Kasman Singedimejo. Tokoh-tokoh ini akhirnya menyambut positif usulan Hatta. Dalam disertasinya, Syafii Maarif melihat bahwa perubahan kata-kata tersebut memberikan bukan hanya dimensi sosiologis seperti dalam pemikiran Soekarno sebelumnya, tetapi juga dimensi tauhid (Maarif, 2006: 157). Syafii Maarif menambahkan bahwa bagi Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila lain, dasar spiritual dan etik, yang memberi negara landasan moral yang kukuh (Maarif, 2006: 157-159). Dengan perubahan ini kelima sila Pancasila begitu koheren dan saling ikat mengikat.

Pancasila dan Problem

Sesungguhnya problem dari Pancasila adalah tidak sampai hanya dengan penjelasan historis, rasionalitas tetapi juga aktualitas dan kalau boleh diterjemahkan, yaitu bagaimana mengaplikasikan Pancasila ke dalam kondisi aktual berbangsa dan bernegara saat ini. Buku ini sebetulnya lahir dari kegelisahan seorang Yudi Latif, mengapa Pancasila adalah “sesuatu yang mati” dalam kehidupan bernegara saat ini. Dalam bahasa masyarakat kebanyakan mengapa Pancasila nilai-nilainya begitu sulit diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Disinilah kiranya tiga hal yang menyebabkan Pancasila menjadi “Pancasia-sia” sampai kondisi saat ini (1) masalah sifat (2) masalah konsep (3) masalah kerja. Dan ini berkaitan dengan persoalan (1) negara (2) masyarakat (3) waktu – keberjarakan waktu dan transformasi zaman yang didalamnya terdapat perubahan nilai politik, ekonomi dan budaya.

Masalah sifat adalah Pancasila dipahami sebagai sesuatu yang sakral. Sebagai wahyu yang turun dari langit. Sehingga seperti dosa ketika diutak-atik dan dikritisi. Padahal Pancasila adalah pemikiran yang ditemukan manusia. Dipikirkan melintasi situasi zaman, arus pemikiran politik dan akar latar belakang ke-Indonesiaan yang kuat. Namun, ketika Pancasila menjadi dasar negara untuk diaplikasikan selanjutnya, Pancasila lalu seolah-olah berubah menjadi monumen. Sampai masa sekarang ini, secara kritis kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai “dia yang ada tapi sulit untuk dirasakan dimana-mana”. Sebagai contoh kita bisa mempertanyakan dimanakah Pancasila ketika masih ada sekelompok umat Islam radikal melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas Islam. Pancasila itu memang ada tetapi mengapa kekerasan atas nama agama yang merusak nilai kemanusiaan dan persatuan masih terus terjadi. Disinilah Pancasila sebenarnya masih dipahami sebagai sebuah monumen yang

sakral. Sesuatu yang berbeda dimensi. Ataukah sebenarnya “dia memang (sampai saat ini) tidak ada – ditiadakan, sehingga sulit dirasakan dimana-mana”. Ketika Pancasila dianggap ada tapi sebenarnya tidak ada, Pancasila semakin berjarak terhadap masyarakat seiring berjalannya waktu. Keberjarakan waktu ini ditakutkan semakin membentuk Pancasila sebagai sebuah “mitos hebat yang memberikan dasar terhadap negara Indonesia yang luar biasa besar sehingga bisa tetap bersatu”. Jika sampai terjadi maka Pancasila akan menjadi “mitos yang sakral”, sesuatu yang sebenarnya akan rentan menjadi “alat politik” daripada “tujuan politik”.

Masalah konsep karena banyak pihak salah menganggap bahwa nilai yang paling esensial dari pancasila adalah persatuan. Memang Soekarno adalah orang yang menekankan persatuan dalam bernegara. Ini bisa dilihat dari sejak dia muda, dimana dia menekankan elemen-elemen ideologi utama Indonesia awal abad ke-20, nasionalisme, marxisme dan islam untuk bersatu bersama-sama membangun front perjuangan melawan kolonialisme. Pandangan ini secara konsisten dibawa sampai dia memegang kekuasaan. Soekarno memang berbeda dengan Soeharto dalam hal persatuan. Soekarno melihat bahwa persatuan itu bukan hanya berdasarkan elemen-elemen ras, suku, adat tetapi juga ideologi. Dan tugas yang paling berat bagi Soekarno adalah menjaga persatuan dalam ideologi. Dia mempercayai bahwa ketika keanekaragaman ideologi tidak disatukan atau katakanlah dijaga untuk bersatu maka akan tercipta *disorder*. Berbeda dengan Soeharto, dia menempatkan persatuan hanya dalam skup ras, suku, adat atau etnisitas tapi tidak dalam politik dan ideologi. Sehingga, persatuan yang tercipta adalah persatuan yang bukan mencerminkan situasi Indonesia tetapi Soeharto “menciptakan persatuan” sendiri pada desain persatuan dalam konstruksi berpikirnya. Persatuan yang tercipta ini tidak “berpikir” dan sebenarnya

persatuan yang diciptakannya “anti-berpikir” (meminggirkan pandangan ideologi dan politik). Dan Soeharto menggunakan Pancasila sebagai dasar daripada itu. Soeharto dengan Orde Baru-nya menggunakan Pancasila sebagai “alat politik” bukan “tujuan politik”. Melalui negara Soeharto menciptakan Pancasila sebagai sebuah konsepsi yang sakral dengan meruntuhkan dimensi ideologisnya dan “kedekatan sifatnya” dengan masyarakat untuk melaksanakan *rust en orde* (Lay, 2013: 61). Kita bisa melihat dari cara Soeharto untuk melenyapkan lawan politiknya, yaitu menggunakan justifikasi bahwa kelompok ini berada di luar “nilai-nilai” Pancasila. Namun, “Pancasila” yang mana dan seperti apa?

Akibatnya pada masa Orde Baru, negara telah membawa Pancasila begitu berjarak daripada masyarakat. Bila dikaitkan dengan kritik Michel Foucault yang melihat praktik-praktik kekuasaan membuat memori kolektif masyarakat berbeda – berjarak – dari apa yang secara faktual semestinya ini seperti ada benang merahnya. Dalam *The Archeology of Knowledge*, Foucault mengatakan “mungkin mereka menemukan kesulitan untuk menyadari bahwa sejarah mereka, ekonomi, praktek sosial, bahasa yang mereka ucapkan, mitologi nenek moyang, dan kisah-kisah yang pernah mereka dengar sewaktu mereka kecil dibentuk oleh aturan yang tidak diperuntukkan untuk kesadaran mereka” (Foucault, 2002: 232). Efeknya adalah ketika masa reformasi tiba, kita dihadapkan pada kebingungan secara intelektual dan konseptual untuk mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat.

Pada tataran konseptual, melihat Pancasila sebagai sesuatu ide yang koheren dan saling kait-mengkait, Pancasila tidak hanya sampai pada titik mengidealkan Indonesia sebagai sebuah “beranekaragam yang bersatu”. Namun, persatuan itu adalah kondisi ideal awal (*amor patriae nostra lex*) untuk mencapai sebuah proyek besar dari

Pancasila, yang juga menjadi cita-cita adanya sebuah entitas bernama Indonesia. Sebetulnya bila dipahami secara seksama, Soekarno pernah berkata bahwa “Pancasila memang adalah alat pemersatu dan saya yakin Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk diatasnya kita letakkan negara Republik Indonesia, tetapi pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita” (hal. 1). Kata “perjuangan kita” ini yang dilupakan, bahwa Pancasila mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita tidak hanya mempertahankan Papua dan Aceh sebagai bagian dari Indonesia tapi lebih dari itu bagaimana caranya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan disana.

Masalah kerja adalah masalah bagaimana, meminjam bahasa Yudi Latif, membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat. Masalah yang terakhir ini berkaitan dengan cara tapi tidak melupakan dimensi filosofis. Di dalam era ketidaklogisan komunikasi, kehidupan sosial yang terfragmentasi, pragmatisme terhadap konsistensi, atau bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa era sekarang ideologi telah mati, bagaimana mengembalikan Pancasila agar dihayati, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara? Yudi Latif dalam bukunya menggunakan konsep dari sejarawan Kuntowijoyo, yaitu “radikalisasi Pancasila”. Radikalisasi Pancasila adalah sebuah konsep untuk mengembalikan Pancasila kembali kepada jalur ideologisnya sebagai ideologi negara tapi tidak sampai disitu Pancasila juga diilmiahkan seperti ilmu. Pancasila juga harus berdialog dengan realitas sosial, menjadi kritik terhadap kebijakan negara serta mengubah paradigma dari melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi melayani kepentingan horizontal (hal. 48). Pertanyaannya sampai

saat ini manakah yang telah dan sedang dilakukan oleh negara apakah radikalisasi Pancasila atau de-radikalisasi Pancasila?

Bibliografi

- Adams, Cindy (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo.
- Ahmad Syafii Maarif (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Cornelis Lay (2013). "Pancasila, Soekarno dan Orde Baru," dalam *Prisma* 32, No. 2 & No. 3.
- Dahm, Bernhard (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Elson, Robert (2008). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel (2002). *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge.
- Geertz, Clifford (2007). "Afterwords: The Politics of Meaning," dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Hirsch, E. D. (1967). *Validity in Interpretation*. New Haven: Yale University Press.
- Kahin, George McT. (2003). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Kuntowijoyo (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nagazumi, Akira (1986). "Masa Awal Pembentukan Perhimpunan Indonesia: Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, 1916-1917," dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (eds)(1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Scherer, Savitri (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Nasionalis Priyayi Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soekarno (1964), "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme," dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*. Djakarta: Panitia Dibawah Bendera Revolusi.
- Skinner, Quentin (2002). *Visions of Politics: Regarding Method, Volume 1*. Cambridge: Cambridge University Press.